

Potret Krisis Sosio-Ekologi Kawasan Pesisir Dampak Reklamasi

Adelia Salsabila Anugrah^a, Mila Karmilah^a, dan Bobby Rahman^a

^a Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

E-mail korespondensi: adeliasalsabila1412@gmail.com

Abstrak: Kajian ini mengamati potret krisis sosio-ekologi yang muncul akibat reklamasi yang dilakukan guna menjawab keterbatasan lahan. Kasus reklamasi di Indonesia diambil untuk diperbandingkan dengan melihat bagaimana krisis sosio-ekologi dalam reklamasi. Kebutuhan lahan baru yang menjadi salah satu alasan dalam mereklamasi akan dikaji lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkannya pada krisis sosio-ekologis yang dirasakan masyarakat kawasan pesisir. Kajian ini menggunakan teknik analisis literature review yang dilakukan dengan menelusuri penelitian sebelumnya, dokumen, serta informasi media yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kajian ini dilandasi dengan variabel, indikator, dan parameter untuk mengidentifikasi krisis sosio-ekologis yang muncul di kawasan pesisir akibat reklamasi. Kajian ini menghasilkan bahwa reklamasi di Indonesia menimbulkan berbagai krisis sosio ekologi akibat reklamasi di Indonesia tidak memperhatikan tata kelola yang baik. Reklamasi telah memperburuk kondisi kehidupan kawasan pesisir dengan perubahan pola mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan, luntarnya budaya, ketidakberlanjutan fungsi ruang publik, serta menyebabkan kerusakan ekosistem yang telah merusak keseimbangan lingkungan.

Kata kunci: Krisis Sosio-Ekologi, Kawasan Pesisir, dan Reklamasi.

Abstract: This study examines the portrait of the socio-ecological crisis that has arisen as a result of the reclamation carried out to address land limitations. The case of reclamation in Indonesia is taken for comparison by looking at the socio-ecological crisis in reclamation. The need for new land which is one of the reasons for reclamation will be studied more deeply about the impact it has on the socio-ecological crisis felt by the coastal area community. This study uses a literature review analysis technique which is carried out by tracing previous research, documents, and media information related to the issues studied. This study is based on variables, indicators, and parameters to identify socio-ecological crises that have arisen in coastal areas due to reclamation. This study results that reclamation in Indonesia causes various socio-ecological crises due to reclamation in Indonesia not paying attention to good governance. Reclamation has worsened the living conditions of coastal areas with changes in livelihood patterns and welfare levels, the loss of culture, the unsustainability of the function of public spaces, as well as causing damage to ecosystems that have damaged the balance of the environment.

Keywords: Socio-Ecological Crisis, Coastal Areas, and Reclamation.

How to cite (APA 6th Style):

Anugrah, Adelia Salsabila. Karmilah, Mila. & Rahman, Bobby. (2022). Potret Krisis Sosio-Ekologi Kawasan Pesisir Dampak Reklamasi, *Uniplan* Vol 03 (1): 9-21. doi: 10.26418/uniplan.v3i1.52818

1. PENDAHULUAN

Keterbatasan lahan mendorong pembuatan daratan baru sebagai penguasaan ruang perairan laut yang mengakibatkan kerusakan ekosistem perairan laut dan pesisir, hal tersebut menjadikan keterbatasan akses publik terhadap ruang baru. Reklamasi bentuk dari perampasan dengan mengambil alih sumber daya laut menjadi aset pribadi elite (Grydehj, 2015). Dengan tata kelola yang tidak sesuai mengakibatkan adanya tindakan yang menekan keamanan dan mata pencaharian serta dampak negatif pada kesejahteraan sosio-ekologis (Bennett & Satterfield, 2015). Apabila memfasilitasi investasi pembangunan reklamasi menjadikan pendorong serius kerusakan sosio-ekologis yang terjadi di ekosistem perairan laut maupun pesisir. Hal tersebut berimbas hilangnya kontrol terhadap komunitas sumber daya laut serta hilangnya ikatan sosio ekosistem setempat (Knott & Neis, 2016).

Pada dasarnya reklamasi merupakan aktivitas sebagai proses merubah daerah atau areal yang tidak berfungsi sebagai daerah yang dapat digunakan dalam aktivitas manusia sebagai sarana dan prasarana baru

seperti pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, pemukiman, fasilitas sosial, rekreasi (Husna et al, 2012). Menurut Said (2019), Hal ini didasari oleh tingkat populasi manusia yang semakin tinggi. Reklamasi sebagai kebutuhan untuk pengembangan daerah atau pemekaran kota sebagai bentuk penataan kawasan pesisir, pengembangan ekowisata, dan sebagainya yang memberikan keuntungan. Akan tetapi, reklamasi harus memperhatikan keseimbangan alamnya, karena kegiatan reklamasi merupakan intervensi manusia sehingga bagaimanapun reklamasi tidak disarankan namun dapat dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam mereklamasi, antara lain sebagai pengembangan kawasan budidaya, pengembangan wilayah perkotaan yang padat, dan memperhatikan keseimbangan ekosistemnya agar tetap dinamis. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 23 bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dengan wajib memenuhi persyaratan dalam memperhatikan pengelolaan lingkungan, kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 34 bahwa reklamasi hanya dapat dilakukan jika fungsi sosial ekonomi lebih besar dibanding biaya sosial ekonominya, pelaksanaan reklamasi harus menjaga dan memperhatikan beberapa elemen yang mendasari reklamasi yaitu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, kelestarian lingkungan pesisir dan kepentingan pemanfaatan pesisir harus seimbang, dan harus memperhatikan ketentuan teknis dalam pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

Dilihat dari ketiga kajian analisis studi kasus kawasan reklamasi yaitu Reklamasi Teluk Benoa, Bali; Reklamasi Pantai Di Kelurahan Gamalama Kota Ternate; dan Reklamasi di Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan tampak jelas akibat dari reklamasi tersebut menjadikan krisis ekologi dan sosial. Dari sisi sosialnya reklamasi menggusur nelayan dari pekerjaan yang sebelumnya dan juga sumber-sumber kehidupannya, sehingga merugikan nelayan karena terampasnya daerah mata pencahariannya. Dampak sosial lainnya dari reklamasi telah menyebabkan kurangnya aksesibilitas ruang publik, ketidakberlanjutan fungsi ruang publik yang tidak memberikan ruang bagi masyarakat dan menimbulkan penguasaan hak terhadap ruang publik serta dampak ekologisnya yang sangat signifikan terhadap degradasi lingkungan (Said, 2019). Seperti kehancuran ekosistem di kawasan pesisir pantai dengan hilangnya keanekaragaman hayati berupa hilangnya berbagai spesies mangrove, punahnya spesies biota laut dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Dampak lingkungan lain dari reklamasi, meningkatkan kemungkinan banjir. reklamasi dapat mengubah landscape (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi). Perubahan tersebut meliputi kedalaman dan sedimen laut, dataran landai, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus pantai, dan kerusakan sistem perairan. Antara lain dapat digunakan sebagai aktivitas manusia sebagai sarana dan prasarana baru seperti pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, pemukiman, fasilitas sosial, rekreasi. Dampak tersebut didasari oleh hak atas ruang wilayah laut sebagai kepentingan pembangunan namun sangat disayangkan bahwa dengan praktik dalam mengelola lingkungan hidup perlu diusahakan untuk memikirkan keseimbangan alam dan manusia tanpa hak untuk kepentingan individu maupun kelompok untuk mencapai keadilan ekologisnya. Krisis lingkungan dan permasalahan sosial yang diakibatkan kepentingan secara singkat dijadikan peluang sebagai kekeluasaan dalam pembangunan yang diharapkan untuk menyejahterakan rakyat yang kekurangan lahan telah menyebabkan pada perluasan wilayah yang tidak terelakan dalam keberlanjutan lingkungan dan sosiologi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian kembali mengenai krisis sosio-ekologi kawasan pesisir dampak dari reklamasi. Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan fenomena, permasalahan, teori pendukung yang menguatkan fenomena dan permasalahan serta memuat tujuan penelitian. Pendahuluan tidak boleh terlalu panjang dan langsung menjurus pada tema penelitian yang dilaksanakan. Silahkan ketik pendahuluan pada bagian ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Reklamasi

Menurut Srianti (2018), reklamasi pantai merupakan aktivitas mengurug atau menimbun material dengan tujuan untuk mendapatkan lahan yang kering. Sedangkan menurut Japar (2020), reklamasi

merupakan aktivitas sebagai proses merubah daerah atau areal yang tidak berfungsi menjadi daerah yang dapat digunakan sebagai kegiatan manusia antara lain sebagai sarana dan prasarana baru seperti pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, pemukiman, sarana sosial, rekreasi dan sebagainya. Dan menurut Said (2019) Reklamasi merupakan proses menjadikan daratan baru pada suatu daerah perairan/pesisir pantai atau daerah rawan. Rencana reklamasi pantai mempunyai prinsip untuk akomodasi kebutuhan yang diperlukan dengan melihat prinsip rencana reklamasi yaitu tidak menjadikan hutan bakau yang merupakan kawasan lindung, cagar alam, dan suaka margasatwa sebagai areal untuk direklamasi, sudah terdapat kawasan budidaya yang dikembangkan, kawasan perkotaan yang padat sehingga membutuhkan lahan sebagai pengembangan wilayah, dan bukan kawasan yang dijadikan sebagai batas administrasi wilayah. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan ketentuan untuk memenuhi dalam mereklamasi pantai khususnya proyek reklamasi dalam skala besar yang signifikan didalam RDTR. Dalam RDTR kawasan reklamasi hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan administratif meliputi telah memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda dengan mendeliniasi kawasan reklamasi pantai; lokasi reklamasi telah ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi ataupun yang telah direklamasi; sudah terdapat studi kelayakan terkait pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan (studi investasi); dan terdapat studi AMDAL kawasan maupun regional.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2004), dalam reklamasi harus mencakup dan memperhatikan hal-hal terkait sebagai berikut:

a. Kondisi Fisik

Kondisi fisik harus memperhatikan Perencanaan tata ruang, bagaimana lahan yang akan digunakan, harus mempertimbangkan berfungsinya jaringan drainase, harus memperhatikan keseimbangan hidrologi dan hidrodinamika serta Hidro-oseanografi, bentuk geomorfologi, fasilitas-fasilitas di sekitar lahan, material urugan, air tanah, dan transportasi.

b. Kondisi ekologi

Kondisi ekologi dan ekosistem pesisir harus dipastikan keberlanjutannya sehingga harus memperhatikan gangguan terhadap keberadaan biota perairan endemik dan langka, penurunan yang signifikan dari keragaman, kelimpahan dan biomasa organisme, kepunahan biota, kerusakan terhadap fungsi dari habitat/ekosistem, dan gangguan terhadap suatu kawasan lindung.

c. Aspek Hukum

Harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang meliputi hukum adat, hukum hak atas tanah, dan hak atas pemanfaatan perairan.

d. Aspek Sosial Ekonomi Budaya

Perencanaan reklamasi harus memperhatikan Aspek Sosial Ekonomi Budaya seperti Persepsi masyarakat Sosialisasi dan penyampaian informasi, Pranata sosial, Aktivitas ekonomi, Demografi (kependudukan), Peran masyarakat, dan Daerah cagar budaya dan situs sejarah.

e. Aspek Pendukung

Aspek-aspek pendukung lainnya yang harus diperhatikan antara lain Jasa lingkungan (pariwisata bahari dan perhubungan laut), Daya Dukung Lingkungan, Aksesibilitas lokasi, dan Fasilitas umum.

2.2. Krisis sosio-ekologis

Menurut Kamim (2020), krisis sosio-ekologis merupakan krisis yang terjadi yang mengakibatkan keadaan lingkungan semakin memburuk dan yang terjadi antara keseimbangan ekosistemnya dan perkembangan tata ruang perkotaan yang tidak bisa dikendalikan dengan sosial masyarakat yang merupakan elemen penting dan elemen yang paling memahami keadaan lingkungan dan bagaimana memanfaatkan dan mengelola sesuai dengan eksistingnya dengan terlibatnya masyarakat setempat dengan kondisi fisiknya dalam menjaga ekosistem berkaitan dengan masalah krisis sosio-ekologis. Beberapa fenomena penting seperti krisis sosio-ekologi berupa proses-proses destabilisasi kesetimbangan alam yang diakibatkan oleh peradaban late-modernity yang menempatkan seluruh elemen ekosistem dalam ancaman kehancuran bersama menjadi penting dalam ekologi manusia (Dharmawan, 2007).

2.2.1 Sosiologi

Menurut Ivan (2019), kajian sosiologi dapat dilihat dari tiga sisi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam meninjau krisis sosio, sebagai berikut:

a. Kondisi Sosial Budaya

Suatu tolak ukur kehidupan lingkungan budaya yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan kebiasaan yang diciptakan oleh manusia agar dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang berada di dalamnya.

b. Kondisi Sosial Ekonomi

Proses perilaku dan tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alamnya untuk menyejahterakan individu, masyarakat, atau negara.

c. Kondisi Sosial Politik

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan untuk kebaikan bersama yang mengikat keduanya dalam suatu wilayah tertentu.

Tabel 1. Aspek Sosial (penulis, 2021)

Aspek	Variabel/ Indikator	Penjelasan
Budaya	Hilangnya budaya	Adanya reklamasi dapat mengakibatkan hilangnya budaya yang ada pada masyarakat.
Ekonomi	Mata Pencaharian	Adanya reklamasi dapat mengakibatkan perubahan pola mata pencaharian masyarakat dan tingkat kesejahteraan pada masyarakat.
	Tingkat Kesejahteraan	
Politik	Ketimpangan tata kelola	Reklamasi dapat menimbulkan ketimpangan politik mengenai tata kelola pada pemerintah dan masyarakat sekitarnya.

2.2.2 Ekologi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengartikan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan Ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Ekologi merupakan kesatuan antara kondisi fisik yang meliputi sumber daya alam seperti biotik dan abiotik yang berada di muka bumi, yang saling berkaitan dengan manusia. Ekologi juga berarti apapun yang berada di sekitar manusia dan terkait dengan kehidupan manusia. Komponen ekologi terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Komponen lingkungan hidup terbagi menjadi beberapa yaitu

- a. Komponen biotik merupakan segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan dan hewan.
- b. Komponen abiotik merupakan segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti air dan tanah.

Tabel 2. Komponen Lingkungan (penulis, 2021)

Komponen Lingkungan	Variabel/Indikator	Penjelasan
Kondisi Biotik	Tumbuhan	Adanya reklamasi dapat mengakibatkan keberlangsungan hidup biota (fauna dan flora) darat dan perairan dan habitat atau ekosistem perairan pesisir.
	Hewan	
Kondisi Abiotik	Air	Adanya reklamasi dapat mengakibatkan perubahan tatanan perairan (kualitas air, pola gelombang, pola arus dan pola perubahan garis pantai) dan perubahan bentang alam.
	Tanah	

3. LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam kajian ini berdasarkan pada variabel krisis sosio menurut Ivan (2019) yang melihat dari 3 sisi yaitu budaya, ekonomi, dan politik, dan pada variabel krisis ekologi yaitu biotik dan

abiotik. Untuk mengetahui berbagai aspek-aspek sebagai indikator dalam mengamati kajian ini. Berikut adalah tabel variabel, indikator dan parameter yang akan digunakan :

Tabel 3. Variabel, Indikator, dan Parameter (penulis, 2021)

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Krisis Sosio	Budaya	Adanya reklamasi dapat mengakibatkan hilangnya budaya yang ada pada masyarakat.
		Ekonomi	Adanya reklamasi dapat mengakibatkan perubahan pola mata pencaharian masyarakat dan tingkat kesejahteraan pada masyarakat.
		Politik	Adanya reklamasi dapat menimbulkan ketimpangan politik mengenai tata kelola pada pemerintah dan masyarakat sekitarnya.
2	Krisis Ekologis	Biotik	Adanya reklamasi dapat mengakibatkan keberlangsungan hidup biota (fauna dan flora) darat dan perairan dan Habitat atau ekosistem perairan pesisir
		Abiotik	Adanya reklamasi dapat mengakibatkan perubahan tatanan Hidro-oseanografi (kualitas air, pola gelombang, pola arus dan pola perubahan garis pantai) dan Geomorfologi

4. METODOLOGI

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif untuk mengetahui Potret Krisis Sosio-Ekologi Kawasan Pesisir Dampak dari Reklamasi, yang berdasarkan pada penelitian studi kasus, dengan teknik analisis literature review guna mengetahui dan mengevaluasi pada penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, dengan harapan akan memperoleh temuan baru dari kajian ini. Teknik atau cara pengumpulan data dalam kajian ini dengan mencari sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, dokumen, serta informasi media yang berkaitan dengan kajian ini. Studi kasus yang akan diangkat untuk diamati adalah Reklamasi Teluk Benoa, Bali; Reklamasi Pantai di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate; dan Reklamasi Kecamatan Tapaktuan, Di Ibukota Kabupaten Aceh Selatan. Hasil akhir dari kajian ini adalah untuk mengamati dan mengetahui seberapa besar Krisis Sosio-Ekologi yang akan di rasakan bagi kehidupan manusia dan lingkungan khususnya kawasan Pesisir akibat dari reklamasi.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Reklamasi Teluk Benoa, Bali

Berdasarkan kajian Slamet Subekti dengan judulnya Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa. Dalam kajiannya Bali merupakan sebuah pulau yang berada di sebelah timur pulau Jawa dan sebelah barat pulau Lombok. Dengan luas Provinsi Bali seluas 5.636,66 km² atau 0,29% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan administratif Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten, 1 kotamadya, 55 kecamatan, dan 701 desa/kelurahan. Walaupun Bali merupakan pulau kecil yang luasnya hanya 0,29% dari luas Nusantara (5.632,86 km²) dengan jumlah penduduknya 4,225 juta jiwa. Bali memiliki potensi alam yang indah dengan karakteristik wilayah yang beriklim tropis, hutan yang hijau, gunung, danau, sungai serta sawah hijau sehingga menarik para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Bali juga terkenal akan kearifan lokal dengan berbagai keanekaragaman kegiatan budaya dan upacara adat yang meliputi perpaduan dari alam dan manusia diwujudkan dengan kebudayaan yang sakral dengan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan daerah lain. Dengan luasan Bali yang kecil kebutuhan akan lahan pertanahan untuk mendukung pariwisata di Bali menjadikan pemerintah dan investor berkeinginan mereklamasi Teluk Benoa.

Pada tahun 2011 Presiden ke- 6 Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW) Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) yaitu Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 yang disambut baik oleh masyarakat

Bali dan lembaga swadaya lingkungan hidup di Bali memuat kebijakan yang dapat dijadikan sebagai pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan yang bertendensi bisnis dari investor dalam maupun luar negeri serta untuk melindungi kawasan konservasi di Bali. Namun saat akhir masa jabatannya sebagai Presiden, SBY mengeluarkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yakni Perubahan Atas Perpres No 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum. Penerbitan Perpres No 51 Tahun 2014 menghapuskan pasal-pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi. Hal ini mengakibatkan kawasan konservasi di wilayah Sarbagita akan berkurang luasannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63A ayat (2) Perpres Nomor 51 tahun 2014 Teluk Benoa di Bali berakibat dapat direklamasi. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika telah mengeluarkan SK Nomor 2138/02-C/HK/2012, sebelum dikeluarkannya Perpres Nomor 51 Tahun 2014, tentang pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa seluas 838 Ha, dengan rencana 438 Ha akan dibangun hutan mangrove, dan sisanya 300 Ha akan dibangun fasilitas umum seperti art centre, gedung pameran kerajinan, gelanggang olahraga, tempat ibadah, sekolah, dsb, dan sekitar 100 ha akan dibangun akomodasi pariwisata. Dalam Keputusan Gubernur Bali terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi izin pemanfaatan.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan kemudian PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) sebagai pengembang proyek telah memperoleh surat izin lokasi reklamasi yaitu SK nomor 445/MENKP/ VIII/2014 dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) pada kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar. Oleh karena itu, upaya-upaya masyarakat Bali baik secara formal maupun non formal melalui media maupun unjuk rasa untuk menolak reklamasi Teluk Benoa Bali. Upaya penolakan semakin keras karena SK Gubernur bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan terkait dengan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk umum atau direklamasi. Namun, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah pusat justru mendukung adanya rencana reklamasi Teluk Benoa dengan mencabut Perpres Nomor 45 Tahun 2011 dan menggantikannya dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang sekaligus mengubah status Teluk Benoa menjadi kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan.

5.1.1 Krisis Sosio Kawasan Pesisir Dampak Reklamasi

Kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan Suci yang diperuntukan upacara adat umat Hindhu di Bali dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pengusaha seperti direklamasi pantai. Sesuai adat dan agama Hindu merubah alam sampai dengan membuat kerusakan lingkungan dan merugikan makhluk Tuhan merupakan tindakan tidak terpuji. Dan dari sisi sosialnya reklamasi juga menggusur nelayan dari pekerjaannya, permukiman dan juga sumber-sumber kehidupannya, sehingga merugikan nelayan karena terampasnya daerah mata pencahariannya. Dengan adanya reklamasi yang mengeksploitasi lingkungan hidup untuk kepentingan pariwisata menjadikan hilangnya nilai kearifan lokal yang terdapat di Teluk Benoa. Serta reklamasi tersebut telah menyebabkan kurangnya aksesibilitas ruang publik, ketidakberlanjutan fungsi ruang publik yang tidak memberikan ruang bagi masyarakat dan menimbulkan penguasaan hak terhadap ruang publik. Dan investor mengelabui sistem sosial dan moral masyarakat sehingga yang terjadi cara pandang kapitalisme secara bersamaan.

5.1.2 Krisis Ekologis Kawasan Pesisir Dampak Reklamasi

Reklamasi yang terjadi pastinya merusak fungsi dan nilai konservasi pertanahan dan perairan di Teluk Benoa, yang menjadi ancaman kerusakan keanekaragaman hayati di kawasan pesisir lainnya. Akibat direklamasi Teluk Benoa berkurangnya fungsi Teluk Benoa sebagai tampungan banjir dari 5 sub- DAS (Daerah Aliran Sungai), meliputi DAS Badung, DAS Mati, DAS Tuban, DAS Bualu, DAS Sama, termasuk sungai yang berasal dari alur rawa. Yang menyebabkan daerah sekitarnya, seperti daerah Sanur Kauh, Suwung Kangin, Pesanggaran, Pemogan, Simpang Dewa Ruci, Tanjung Benoa, dan termasuk Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, serta wilayah dataran rendah di sekitarnya akan tergenang dan banjir. Bukan hanya kerusakan diatas tersebut reklamasi di Teluk Benoa juga memperparah sedimentasi di habitat terumbu karang

sehingga memusnahkan polip karang dan rusaknya terumbu karang di kawasan sekitarnya dan terjadi abrasi yang merusak keanekaragaman hayati dan terumbu karang. Reklamasi juga meningkatkan ketimpangan kepadatan penduduk di Bali Selatan sehingga berpotensi lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan huni karena kebutuhan.

Reklamasi juga menimbulkan pencemaran lingkungan pantai karena limbah yang dihasilkan, perubahan garis pantai pola arus laut saat ini, kesemrawutan pola lalu lintas kota, kegiatan nelayan menjadi terganggu, rusaknya tata air tanah maupun air permukaan termasuk erosi, penurunan kualitas dan kuantitas air, potensi banjir di kawasan pantai, terjadinya pencemaran pantai, permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah, potensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa gas, dan lainnya), potensi gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan nelayan, berkurangnya hutan mangrove, terancamnya biota pantai langkah).

5.2. Reklamasi Pantai di Kelurahan Gamalama Kota Ternate

Berdasarkan kajian Hery Djainal dengan judulnya Analisis Reklamasi Pantai Kota Ternate dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan Fisik Kawasan Pesisir. Dalam kajiannya Pantai di Kelurahan Gamalama pada awalnya merupakan kawasan kampung nelayan. Dengan berkembangnya kota dan kebijakan pemerintah Kota Ternate terkait keterbatasan lahan dalam pengembangan kota, sehingga pada kawasan pesisir pantai di Kelurahan Gamalama direklamasi sebagai penambahan daratan yang diperuntukan kawasan komersial dan jalan lingkar Kota Ternate dengan total luas lahan wilayah yang telah direklamasi yaitu seluas 529.840 m². Pelaku reklamasi pantai di Kelurahan Gamalama terdiri atas badan usaha swasta (kontraktor/pengembang) dan masyarakat secara perseorangan. Serta aktor dalam reklamasi pantai di Kelurahan Gamalama terdiri atas badan usaha swasta (kontraktor/pengembang) dan masyarakat secara perseorangan. Sebelum dikeluarkan kebijakan pemerintah Kota Ternate dalam penataan kawasan pantai Kota Ternate pada tahun 2001 proses reklamasi pantai di Kelurahan Gamalama telah berlangsung.

5.2.1 Krisis Sosio Kawasan Pesisir Dampak Reklamasi

Secara sosial reklamasi pantai menjadikan perubahan-perubahan fungsi lahan atau ruang baik di lokasi eksisting dan juga pada lokasi menjadi pusat pelayanan ekonomi perkotaan yang dipastikan juga dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber kehidupannya. Hal tersebut dilakukan karena kawasan komersial dibangun dengan mensyaratkan pantai sekitarnya bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan.

5.2.2 Krisis Ekologis Kawasan Pesisir Dampak Reklamasi

Reklamasi Pantai di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate mengakibatkan dampak terhadap lingkungan yang terlihat pada perubahan pola pasang surut, pola arus dan terjadinya abrasi pantai di perairan Pulau Ternate, saat air laut pasang kecepatan arus di perairan dermaga Ahmad Yani lebih besar. Dan reklamasi di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate mengakibatkan sedimentasi dengan adanya pembuatan tanggul laut yang tidak memperhatikan komposisi tanpa melihat arah arus bawah laut, pecahnya ombak dan gelombang serta pasang surut yang menjadikan sedimentasi pada perairan pantai di sekitarnya sehingga mengakibatkan perubahan kedalaman laut. Kegiatan reklamasi pantai di Kelurahan Gamalama berpengaruh juga pada keberadaan, pertumbuhan dan kelangsungan hidup terumbu karang akibat dari pengurangan.

Dampak lingkungan jelas nampak di depan mata adanya reklamasi pantai Kelurahan Gamalama antara lain kehancuran ekosistem di kawasan pesisir pantai di Kelurahan Gamalama berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang punah akibat proyek reklamasi itu dengan hilangnya berbagai spesies mangrove, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Dampak lainnya dari reklamasi pantai yaitu meningkatkan potensi banjir. Hal itu dikarenakan proyek tersebut dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan tersebut berupa kedalaman laut dan sedimentasi, tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan tata air.

5.3. Reklamasi Kecamatan Tapaktuan, Di Ibukota Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan kajian Nurul Husna dengan judulnya Dampak Ekologi, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat akibat Reklamasi Pantai Tapaktuan Aceh Selatan. Karena terbatasnya lahan di Ibukota Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan KAPEDALDA Kecamatan Tapaktuan seluas 11.500 ha terdapat rencana memperluas kota dengan mereklamasi dengan cara menggeser tanggul laut (seawall) ke arah depan pantai. Dalam perencanaan Pemda Aceh Selatan sepanjang pantai yang direklamasi ini menjadi kawasan pemukiman penduduk, perkantoran, pertokoan, pelabuhan umum, taman kota dan sarana sosial lainnya. Dalam realisasi kegiatan ini dimulai dari sebelah kanan Dermaga Pelabuhan Umum sampai ke sebelah kanan Tempat Pelelangan Ikan (belakang kantor Dinas Perikanan dan Kelautan) Gampong Lhok Bengkuang, namun yang sudah terealisasi direklamasi hanya di Gampong Pasar seluas \pm 5 ha.

5.3.1 Krisis Sosio Kawasan Pesisir Dampak Reklamasi

Dengan adanya reklamasi budaya gotong royong masyarakat, keakraban dan kepedulian masyarakat menghilang serta lunturnya kebiasaan masyarakat keduri laut. Dan terlihat dengan jelas dampak terbesar dari reklamasi tersebut pada profesi masyarakat pesisir yang beralih dari nelayan menjadi buruh angkut semen dipelabuhan, dan tidak bisa menggantungkan hidupnya yang hanya menjadi buruh angkut sementara dan setelahnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Dan adanya paradigma dalam reklamasi dengan menjadikan suatu kota sebagai kota multifungsi, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Pemda Aceh Selatan dalam perencanaannya yakni sepanjang pantai yang direklamasi ini menjadi kawasan pemukiman penduduk, perkantoran, pertokoan, pelabuhan umum, taman kota dan sarana sosial lainnya yang dimana diharapkan mampu mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warganya. Namun, realitanya gagal total dalam implementasinya di lapangan. Sehingga berbagai permasalahan sosial dan lingkungan hidup muncul dan sulit dipecahkan di daerah reklamasi saat ini justru dikarenakan oleh paradigma tersebut. Perencanaan reklamasi yang seharusnya disesuaikan dengan rencana tata ruang kota. Dan pengembangan kota harus memerhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi. Serta daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik.

5.3.2 Krisis Ekologis Kawasan Pesisir Dampak Reklamasi

Dampak reklamasi terhadap ekologis antara lain yaitu mengakibatkan kematian biota akuatik dan berpengaruh banyaknya biota perairan dan biota darat antara lain terhadap biota perairan menunjukkan bahwa masyarakat mendapatkan kepiting, ikan karang dan udang dan sebagainya sebelum reklamasi dibandingkan dengan setelah reklamasi. Punahnya terumbu karang dikarenakan tanah urug di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur karena adanya reklamasi pantai memberikan dampak besar yang negatif terhadap kematian biota akuatik yang menyebabkan gangguan produksi ikan, udang, kerang dan sebagainya sehingga berpengaruh buruk terhadap nelayan. Dan Fauna Darat menunjukkan bahwa menyebabkan meningkatnya jumlah satwa liar karena keberadaan bangunan di daerah reklamasi belum optimal menjadi rumah/sarang. Serta Vegetasi menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis vegetasi semakin sedikit dan jenis kelapa sebagai tanaman penyangga juga semakin sedikit ditemui setelah adanya reklamasi. Hal ini akan berakibat terhadap perubahan struktur ekosistem pesisir. Selain itu juga, reklamasi menyebabkan perubahan struktur ekosistem pesisir yang mengakibatkan beberapa rusaknya tatanan air dan perubahan bentang lahan serta rusaknya penyangga wilayah pesisir untuk jalan konservasi.

Temuan Studi

Berikut hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 3 studi kasus krisis sosio-ekologi kawasan pesisir dampak dari reklamasi.

Tabel 4. Analisis Krisis Sosio-Ekologi terhadap 3 Studi Kasus (penulis, 2021)

No	Variabel	Indikator	Analisis Krisis Sosio-Ekologi terhadap 3 Studi Kasus		
			Reklamasi Teluk Benoa, Bali	Reklamasi Pantai Di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate	Reklamasi Kecamatan Tapaktuan, Di Ibukota Kabupaten Aceh Selatan
1	Krisis Sosio	Budaya	Hilangnya kawasan yang dianggap oleh masyarakat adat sebagai kawasan adat dan budaya yang suci dengan memperkuat pendapat bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan suci yang dilandasi oleh Pesamuhan Sabha Pandita PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat umat Hindhu di Bali.	-	Lunturnya kebiasaan masyarakat keduri laut dari jumlah responden 85 orang sebelum reklamasi 38.24% menjawab cukup baik namun setelah reklamasi 62.94% menjawab kurang baik. Serta adanya reklamasi budaya gotong royong masyarakat, keakraban dan kepedulian masyarakat menghilang.
		Ekonomi	Terjadinya reklamasi menggusur 76 kk yang bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga mengalami kerugian perekonomian karena terampasnya daerah mata pencahariannya, permukiman dan juga sumber-sumber kehidupannya.	Adanya reklamasi menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber kehidupannya akibat berkurangnya hasil tangkapan dan daerah tangkapan yang semakin jauh. Dari 56 responden 67,86 % yaitu 38 orang responden beralih pekerjaan dari nelayan menjadi pedagang, sedangkan 18 responden atau 32,14% dari nelayan menjadi pekerja serabutan.	Terjadinya reklamasi hilangnya daerah tangkapan dari jumlah responden 85 orang sebelum reklamasi jumlah nelayan 35.29% cukup banyak namun setelah reklamasi 28.47% nelayan beralih pekerjaan menjadi buruh angkut yang tidak tetap dan tukang becak.
		Politik	Tidak adanya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga yang terjadi masyarakat setempat menolak secara formal dan in formal melalui media maupun unjuk rasa namun penolakan reklamasi Teluk Benoa dari masyarakat tidak didengar dan ditanggapi serta tidak didukung oleh pemerintah akan tetapi pemerintah pusat pada masa jabatan SBY mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa dengan menetapkan bahwa kawasan tersebut kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan.	Upaya Pemerintah Daerah yang diharapkan untuk menghadapi masalah keterbatasan lahan yang akan digunakan sebagai kawasan komersial, namun dibalik hal tersebut kehadiran masyarakat diabaikan. Sehingga yang terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan adanya kegiatan reklamasi pantai yang pertama dirasakan masyarakat di Kelurahan Gamalama tergusurnya mata pencahariannya karena Kawasan sekitarnya harus bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan tradisional.	Reklamasi yang direalisasikan oleh Pemda Aceh Selatan untuk kepentingan kota sebagai kota multifungsi dimana diharapkan meningkatkan pendapatan daerah dan mampu mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warganya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dalam implementasinya di lapangan. Karena yang terjadi dampak besar bagi masyarakat pesisir Gampong Pasar dan Gampong Lhok Bengkuang yang berprofesi sebagai nelayan karena tergusurnya kampung nelayan dan mata pencahariannya diluar kesepakatan mengenai reklamasi antara pemerintah dan masyarakat.

No	Variabel	Indikator	Analisis Krisis Sosio-Ekologi terhadap 3 Studi Kasus		
			Reklamasi Teluk Benoa, Bali	Reklamasi Pantai Di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate	Reklamasi Kecamatan Tapaktuan, Di Ibukota Kabupaten Aceh Selatan
2	Krisis Ekologi	Biotik	Terjadinya pencemaran akibat timbunan material reklamasi pada saat pembangunan sehingga hilangnya keanekaragaman hayati bawah laut seperti biota perairan, rusaknya habitat terumbu seluas 438 m ² , serta rusaknya ekosistem mangrove dan prapat yang ada di Teluk Benoa.	Akibat proyek reklamasi punahnya keanekaragaman hayati antara lain berupa hilangnya berbagai spesies mangrove sepanjang garis pantai 51 m, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, sehingga berdampak buruk bagi tangkapan para nelayan yang semakin jauh dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Dan rusaknya padang lamun seluas 192 m ² .	Terjadinya reklamasi mengakibatkan kematian biota akuatik seperti plankton dan bentos dan jumlah ikan, udang, kerang dan sebagainya setelah reklamasi dalam jumlah sedikit dari jumlah responden 85 orang sebelum reklamasi 50.59% menjawab cukup banyak namun setelah reklamasi 95.29% menjawab sedikit. Keberadaan terumbu karang setelah reklamasi 100% masyarakat menjawab telah hilangnya terumbu karang. Serta hilangnya kawasan penyangga seluas 861,93 m ² disekitar kawasan pesisir Gampong Pasar.
		Abiotik	Terjadi Banjir di Sanur Kauh, Suwung Kangin, Pesanggaran, Pemogan, Simpang Dewa Ruci, Tanjung Benoa, dan termasuk Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, serta wilayah dataran rendah di sekitarnya karena hilangnya tampungan banjir akibat reklamasi dan terjadi kerusakan lingkungan di daerah lain akibat pengepresan bukit untuk material timbunan. Dan perubahan garis pantai pola arus laut, erosi, penurunan kualitas dan kuantitas air dan sedimentasi sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.	Terjadinya banjir di Kelurahan Gamalama, Kelurahan Dufa-Dufa, Kelurahan Kalumata, sepanjang dermaga A.Yani dan daerah sekitarnya. Hal itu dikarenakan proyek tersebut mengubah bentang alam (geomorfologi) dengan luas lahan 529.840 m ² dan merubah tatanan air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan tersebut antara lain berupa perubahan kedalaman laut dari 3 m sekarang menjadi 0,94 m, sedimentasi, tingkat kelandaian, struktur sedimen sungai, pola pasang surut dan arus laut, abrasi, dan rusaknya kualitas air.	Terjadinya banjir di wilayah Gampong Pasar dan terjadinya perubahan struktur ekosistem pesisir yang mengakibatkan beberapa rusaknya tatanan air dan perubahan bentang lahan seluas ± 5 ha serta rusaknya penyangga di sepanjang pesisir Gampong Pasar untuk jalan konservasi dan menurunnya kualitas air akibat tercemarnya material timbunan.

Dari penjelasan tabel diatas berikut adalah hasil ekstraksi adanya reklamasi terhadap 3 studi kasus krisis sosio-ekologis kawasan pesisir dampak dari reklamasi.

Tabel 5. Hasil Ekstraksi Reklamasi Kawasan Pesisir (penulis, 2021)

Krisis	Aspek	Studi Kasus		
		Reklamasi Teluk Benoa, Bali	Reklamasi Pantai Di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate	Reklamasi Pantai di Kecamatan Tapaktuan, Ibukota Kabupaten Aceh Selatan
Krisis Sosiologi	Budaya	Adanya reklamasi mengakibatkan hilangnya kawasan yang dianggap sebagai kawasan adat dan budaya yang suci oleh masyarakat adat. (-)	Tidak ada data	Adanya reklamasi menjadikan hilangnya kawasan sebagai tempat dalam melaksanakan adat dan budaya masyarakat sekitar. (-)
	Ekonomi	Adanya reklamasi menggusur mata pencaharian para nelayan sehingga terjadi penurunan tingkat pendapatan nelayan. (-)	Adanya reklamasi terjadi penurunan tingkat pendapatan di sektor perikanan karena tergusurnya nelayan tradisional dari sumber mata pencahariannya. (-)	Adanya reklamasi tidak banyak menyerap tenaga kerja karena bersifat sementara dan terjadi penurunan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat karena hilangnya mata pencaharian. (-)
	Politik	Adanya reklamasi menyebabkan ketimpangan tata kelola karena kurangnya koordinasi pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap masyarakat. (-)	Adanya reklamasi terjadi penggusuran nelayan tradisional dari sumber kehidupannya. (-)	Terjadinya reklamasi menyebabkan ketidakseimbangan antara pemerintah dengan masyarakat akibat tergusurnya kawasan yang dijadikan sumber hidupnya. (-)
Krisis Ekologi	Biotik	Karena adanya timbunan material reklamasi sehingga terjadi kerusakan kualitas biota perairan dan ekosistem. (-)	Dengan adanya reklamasi terjadi kepunahan keanekaragaman hayati dan spesies mangrove. (-)	Adanya reklamasi terjadi kematian biota akuatik dan habitatnya yang mengakibatkan penurunan produktifitas perikanan. (-)
	Abiotik	Dengan adanya reklamasi terjadi perubahan pada bentang alam dan perubahan tatanan air, serta hilangnya tampungan air sehingga terjadi penurunan kualitas yang mengakibatkan banjir. (-)	Adanya reklamasi terjadi perubahan bentang alam dan tatanan air yang menjadikan daerah sekitarnya terjadi banjir. (-)	Adanya reklamasi mengakibatkan beberapa rusaknya tatanan air dan perubahan bentang alam serta rusaknya kawasan penyangga wilayah pesisir sebagai jalan konservasi. (-)

6. KESIMPULAN

Berdasarkan ke 3 lokasi studi kasus yang diambil diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya reklamasi tidak memberikan dampak yang lebih baik bagi sosial dan lingkungannya. Mulai dari kondisi budaya dengan hilangnya kawasan sebagai tempat dalam melaksanakan adat dan budaya. Secara ekonomi mengakibatkan penurunan terhadap tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraannya, karena terjadi pola perubahan mata pencaharian dan adanya reklamasi tidak banyak menyerap tenaga kerja karena bersifat sementara. Begitu juga pada kondisi politik terjadi ketimpangan tata kelola antara pemerintah dan masyarakat akibat kurangnya koordinasi dan peran masyarakat yang tidak dihadirkan sehingga yang terjadi tergusurnya masyarakat dari daerah mata pencaharian, permukiman, dan sumber-sumber kehidupannya. Serta dampak negatif terhadap biotik akibat dari material timbunan reklamasi memusnahkan keanekaragaman hayati, seperti menurunnya produktifitas biota perairan, kerusakan terumbu karang, dan hilangnya hutan mangrove sebagai kawasan penyangga. Dan pada abiotik terjadinya perubahan bentang alam, selain itu juga terjadi perubahan ekosistem tatanan air, seperti kedalaman laut,

sedimentasi, tingkat kelandaian, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai, abrasi, erosi, dan merusak kawasan tata air sekitarnya, serta dampak besar yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu meningkatnya bahaya banjir akibat reklamasi karena kurangnya fungsi kawasan tersebut sebagai tampungan air. Dengan melihat dampak reklamasi yang lebih besar terhadap kerusakan lingkungan dan sosial yang sangat jelas dirasakan, maka tidak merekomendasikan adanya pembangunan reklamasi.

7. REKOMENDASI

- a. Perlu dipertimbangkan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, kelestarian lingkungan pesisir dan kepentingan pemanfaatan pesisir sehingga tidak harus melakukan reklamasi.
- b. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat terkait perijinan sehingga tidak terdapat ketimpangan antara pemerintah dan masyarakat.
- c. Pemerintah dengan kewenangannya dalam membuat kebijakan seharusnya tidak ditujukan semata mata untuk kepentingan pemerintah sendiri dan pihak-pihak tertentu, namun sebaiknya lebih memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan tidak mudah untuk membuat kebijakan atas pembangunan yang tidak sesuai dengan sistem tata kelola yang baik diatas kewenangannya.
- d. Perlu dikaji kembali pada kebijakan-kebijakan yang terkait melalui penertiban secara integral dan terpadu, sesuai dengan perencanaan penataan kawasan pantai sehingga peran pemerintah seharusnya dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan adanya kegiatan reklamasi dan tidak hanya terbatas di lokasi rencana akan tetapi pada daerah sekitarnya yang berpeluang terkena dampak secara tidak langsung.
- e. Diperlukan peran dan keterlibatan masyarakat dalam memutuskan pembangunan yang baik, agar masyarakat tidak terkena imbas akibat pembangunan yang tidak ramah terhadap lingkungan.
- f. Reklamasi seharusnya tidak ditujukan untuk mendapatkan lahan hanya dengan tujuan komersial saja, namun terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan dan ilmiah terhadap seberapa besar pengaruh terhadap kerusakan lingkungan dan sosial.

8. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Jurnal

- Aida, A., & An, Q. U. R. (n.d.). Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam. 5, 1–24.
- Aspan, Z. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup). *Amanna Gappa*, 25(2), 9–24.
- Bennett, N. J., Govan, H., & Satterfield, T. (2015). Ocean grabbing. *Marine Policy*, 61–68.
- Cadith, J. (n.d.). Konflik Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Di Pesisir Teluk Banten.
- Dahyar Daraba, Ribka Christy, & Clara Saroinsong. (2020). Dampak Reklamasi Pantai Boulevard Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 27–34. <https://doi.org/10.22487/jpag.v2i1.37>

- Departemen Kelautan dan Perikanan. (2004). Pedoman Reklamasi Di Wilayah Pesisir (Issue 16).
- Dharmawan, A. H. (2007). Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2), 1–40. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i2.5932>
- Djainal, H. (2017). Analisis Reklamasi Pantai Kota Ternate Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik Kawasan Pesisir. *Jurnal Teknologi*, 16(2), 2099–2104.
- Djunaedi, A., & Basuki, M. N. (2002). Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 3(3), 225–231.
- Francisca, M., & Roberto, I. (2018). Kelestarian Lingkungan Sumber Daya Alam Kelautan Dalam Implikasi Reklamasi Laut. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25(1), 59. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5989>
- Gangga, I., & Dewi, S. (2019). Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 390–400. <http://www.forbali.org/>,
- Grydehøj, A. (2015). Making Ground, Losing Space: Land Reclamation and Urban Public Space in Island Cities. *Urban Island Studies*, 1(December), 96–117. doi: 10.20958/uis.2015.6.
- Husna, N. (2012). Dampak Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Reklamasi Pantai Tapaktuan Aceh Selatan. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 1(2), 171–178.
- Imran, S. Y. (2013). Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. *Dinamika Hukum*, 18(3), 457–467.
- IVAN, S. A. (2019). PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2009 DALAM LINGKUNGAN PELABUHAN WISATA DI UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III NUSA PENIDA. 1–45.
- Japar, J. M. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 7(2), 205. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i2.17912>
- Knott, C. & Neis, B. (2016). Privatization, financialization, and ocean grabbing in New Brunswick herring fisheries and salmon aquaculture. *Marine Policy*, 80(1), 1–9.
- Maharani, R., Lugiana, R., & Anggraeni, R. (2011). Morfologi.
- Mirantie, N. (2014). Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 129–146. <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i1.6023>
- Muh Kamim, A. B. (2020). Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 105–120. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1587>
- Puspasari, R., Hartati, S. T., & Anggawangsa, R. F. (2018). Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan Dan Perikanan Di Teluk Jakarta. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 9(2), 85. <https://doi.org/10.15578/jkpi.9.2.2017.85-94>
- Rellua, O. (2013). Proses Perizinan Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai. *Lex Administratum*, 1(2).
- Rina Yulianti, Mufarrijul Ikhwan, N. Z. (n.d.). Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai Di Wilayah Pesisir Selatan Madura. 4(1), 103–121.
- Robin, R. (2019). Fisheries Adaptive Mechanism Analysis and Livelihood Vulnerability At Jakarta Bay. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i3.20371>
- Said, M. (2019). Reklamasi Dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pesisir Pantai Toboko Kota Ternate. *Dintek*, 12(2), 83–91.
- Savira, F., & Suharsono, Y. (2013). Impact of Behavior Reclamation on Social Economic Conditions Other Coastal Communities. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Srianti, A. (2018). Impact of Behavior Reclamation on Social Economic Conditions Other Coastal Communities. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Subekti, S. (2019). Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.53-67>
- Vatria, B. (2010). Berbagai Kegiatan Manusia yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai serta Dampak yang Ditimbulkannya. *Jurnal Belian*, 9(1), 47–54.